

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan setiap misi dan program pembangunan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT pada dasarnya telah dilaksanakan. Akan tetapi capainnya targetnya belum maksimal sehingga belum dapat dikatakan konsisten. Adapun capaian pelaksanaannya ialah sebagai berikut :

a) Misi : “Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air”. Didukung dengan adanya kegiatan/program pembangunan embung dimana capaiannya ialah sebagai berikut :

1. Target pembangunan embung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2013-2018 yaitu sebanyak 28% dari total 2.700 buah embung atau sebanyak 756 buah embung. Pelaksanannya sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan total pembangunan embung sebanyak 158 buah. Sehingga presentase capaian pembangunan embung di tahun 2018 adalah $(158 / 756 \times 100\%)$ atau sebesar 20,89%. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp.27.420.858.050.- dan realisasi anggarannya sebesar Rp.25.710.207.801, dimana presentase realisasi anggarannya ialah $(Rp.25.710.207.801 / Rp.27.420.858.050 \times 100\%)$ atau 93,76%.

b) Misi : “Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.” Didukung dengan adanya kegiatan/program pembangunan, rehabilitasi, serta perbaikan jalan dan jembatan. Adapun capaian target kinerja dan realisasi anggarannya setiap tahun ialah sebagai berikut :

1. Tahun 2016 sesuai data Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, total panjang jalan dan jembatan di Provinsi NTT adalah sepanjang 2.471,49 km dan telah dilakukan pembangunan, dan pemeliharaan sepanjang 1.522,04 km. Sehingga untuk tahun 2016 progres capaiannya adalah $(1.522,04 / 2.471,49 \times 100\%)$ atau sebesar 61,58%. Adapun alokasi anggaran Rp.185.170.196.850,- dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 178.027.836.645,- Maka sampai dengan tahun 2016 presentase realisasi anggaran adalah $(Rp.185.170.196.850 / Rp. 178.027.836.645 \times 100\%)$ atau 96,14 %.
2. Pada Tahun 2017 sesuai data Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, total panjang jalan dan jembatan di Provinsi NTT adalah 2.471,64 km dan telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan sepanjang 1.303,69 km. Sehingga untuk tahun 2017 proges pencapaian kinerja adalah $(1.303,69 / 2.471,64 \times 100\%)$ atau sebesar 52,74 %.
Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.124.685.045.000,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp.123.163.626.145. Maka sampai dengan tahun 2017 presentase realisasi anggaran adalah $(Rp. 123.163.626.145 / Rp.124.685.045.000 \times 100\%)$ atau sebesar 98,79%.

3. Pada Tahun 2018 total panjang jalan dan jembatan di Provinsi NTT adalah sepanjang 2.650 km dan telah dilakukan pembangunan, dan pemeliharaan sepanjang 1.719 km. Sehingga untuk tahun 2018 progres pencapaian kinerja adalah $(1.719 / 2.650 \times 100\%)$ atau sebesar 64,86 %. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 112.332.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.332.463.000. Maka sampai dengan tahun 2018 presentase realisasi anggaranya adalah $(Rp. 112.332.463.000 / Rp.112.332.463.000 \times 100\%)$ atau sebesar 100%.

Dari capaian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan misi dan program pembangunan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, justru berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang direalisasikan dengan maksimal setiap tahunnya sehingngah menyebabkan belum konsistennya RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018 pada Dinas PUPR Provinsi NTT.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT sehinngha tidak konsisten. Pertama adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimana kondisi , kemampuan, kapasitas serta profesionalisme pegawai bidang jasa konstruksi khususnya dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi yang masih kurang. Kedua, Permasalahan utama yang dihadapi dalam Hambatan sistem jaringan jalan untuk akseibilitas dan mobilitas barang dan jasa di Provinsi NTT adalah ketersediaan anggaran untuk jalan provinsi setiap tahun tidak sebanding dengan laju kerusakan (penurunan kondisi) jalan yang terjadi di lapangan.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis berharap dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode selanjutnya dapat lebih maksimal lagi, serta target capaian yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya agar pelaksanaannya bisa lebih konsisten. Kemudian segala faktor penghambat yang telah dirasakan dapat menjadi pelajaran kedepannya sehingga segala hal yang menghambat tersebut dapat diatasi dan ditangani oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Secara garis besar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah khususnya RPJMD pada Dinas PUPR Provinsi NTT selanjutnya adalah :

1. Mempertahankan perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan.
2. Tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
3. Memperbaiki SDM baik dari kualitas maupun dari kuantitasnya
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur agar bisa lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- BAPPEDA Provinsi NTT. 2020. *Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018*. NTT: Bappeda Provinsi NTT.
- Burin, Ferdianus. 2015. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2012-2015*.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2020. *LAKIP tahun 2016-2018*. NTT: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2020. *RENSTRA tahun 2013-2018*. NTT: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kristaung, Robert. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Magdalena Mudjur, Maria. 2018. *Analisis Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi NTT Tahun 2016*
- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Masa Penyusunan RPJMD.
- Radjab, D. 2010. *Problematika Pengaturan RPJMD Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Aspek Perencanaan dan Penganggaran.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Willy, Nur. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru.*

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yuwono, Sony dkk 2005. *Penganggaran Sektor Publik.* Malang: Bayi Media.